

ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROPINSI SUMATERA UTARA

SHITA TIARA

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara

email : ae_shita@yahoo.com

ABSTRAK

Selama proses pembangunan Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini dalam bidang ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menunjukkan adanya peningkatan. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang mengalami peningkatan. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan tidak diikuti meratanya distribusi pendapatan di Sumatera Utara. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data sekunder dengan runtun waktu yaitu pada tahun 2002 sampai 2013, yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil analisis bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara semakin meningkat walaupun tidak sebesar ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia jika dilihat dari nilai koefisien ginya, dimana koefisien gini di Sumatera Utara pada tahun 2013 mencapai 0,354. Tahun 2013 ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi terjadi di Samosir 0,28 dan Tanjung Balai sebesar 0,287 sementara ketimpangan distribusi pendapatan yang paling rendah bahkan mendekati nol (pemerataan sempurna) terjadi di kabupaten Karo sebesar 0,098 dan Labuhan Batu Selatan sebesar 0,108.

Kata Kunci : Ketimpangan distribusi pendapatan, koefisien gini

A. PENDAHULUAN

Istilah pembangunan di Indonesia sudah sejak lama menjadi terminologi sehari-hari. Upaya untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya baru nyata tampak sejak Pelita III, dimana strategi pembangunan diubah dengan menempatkan pemerataan sebagai aspek pertama dalam trilogi pembangunan yang dikenal dengan delapan jalur pemerataan yaitu : (1) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, berupa pangan, sandang dan perumahan; (2) kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pembagian pendapatan; (4) kesempatan kerja; (5) kesempatan berusaha; (6) kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) penyebaran pembangunan; dan (8) kesempatan memperoleh keadilan (Dumairy, 2004).

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Selama proses pembangunan Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini dalam bidang ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menunjukkan adanya peningkatan. Jika tahun 2009, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% maka pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 naik menjadi 6,1%, 6,5% dan 6,3%. Tetapi dari sisi sosial, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia sesuai kebutuhan mereka sehingga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah.

Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan yang merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan dan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah. Selain pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi, proses pembangunan juga bertujuan untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran.

Tabel 1
Indeks Gini Ratio Indonesia Tahun 2005-2013

Provinsi	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aceh	0,299 ⁽²⁾	0,268	0,27	0,29	0,30	0,33	0,32	0,341
Sumatera Utara	0,327	0,307	0,31	0,32	0,35	0,35	0,33	0,354
Sumatera Barat	0,303	0,305	0,29	0,30	0,33	0,35	0,36	0,363
Riau	0,283	0,323	0,31	0,33	0,33	0,36	0,40	0,374
Jambi	0,311	0,306	0,28	0,27	0,30	0,34	0,34	0,348
Sumatera Selatan	0,311	0,316	0,30	0,31	0,34	0,34	0,40	0,383
Bengkulu	0,353	0,338	0,33	0,30	0,37	0,36	0,35	0,386
Lampung	0,375	0,390	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36	0,356
Kepulauan Bangka Belitung	0,281	0,259	0,26	0,29	0,30	0,30	0,29	0,313
Kepulauan Riau	0,274	0,302	0,30	0,29	0,29	0,32	0,35	0,362
DKI Jakarta	0,269	0,336	0,33	0,36	0,36	0,44	0,42	0,433
Jawa Barat	0,336	0,344	0,35	0,36	0,36	0,41	0,41	0,411
Jawa Tengah	0,306	0,326	0,31	0,32	0,34	0,38	0,38	0,387

DI Yogyakarta	0,415	0,366	0,36	0,38	0,41	0,40	0,43	0,439
Jawa Timur	0,356	0,337	0,33	0,33	0,34	0,37	0,36	0,364
Banten	0,356	0,365	0,34	0,37	0,42	0,40	0,39	0,399
Bali	0,330	0,333	0,30	0,31	0,37	0,41	0,43	0,403
Nusa Tenggara Barat	0,318	0,328	0,33	0,35	0,40	0,36	0,35	0,364
Nusa Tenggara Timur	0,351	0,353	0,34	0,36	0,38	0,36	0,36	0,352
Kalimantan Barat	0,310	0,309	0,31	0,32	0,37	0,40	0,38	0,396
Kalimantan Tengah	0,283	0,297	0,29	0,29	0,30	0,34	0,33	0,350
Kalimantan Selatan	0,279	0,341	0,33	0,35	0,37	0,37	0,38	0,359
Kalimantan Timur	0,318	0,334	0,34	0,38	0,37	0,38	0,36	0,371
Sulawesi Utara	0,323	0,324	0,28	0,31	0,37	0,39	0,43	0,422
Sulawesi Tengah	0,301	0,320	0,33	0,34	0,37	0,38	0,40	0,407
Sulawesi Selatan	0,353	0,370	0,36	0,39	0,40	0,41	0,41	0,429
Sulawesi Tenggara	0,364	0,353	0,33	0,36	0,42	0,41	0,40	0,426
Gorontalo	0,355	0,388	0,34	0,35	0,43	0,46	0,44	0,437
Sulawesi Barat	n.a	0,310	0,31	0,30	0,36	0,34	0,31	0,349
Maluku	0,258	0,328	0,31	0,31	0,33	0,41	0,38	0,370
Maluku Utara	0,261	0,332	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,318
Papua Barat	n.a	0,299	0,31	0,35	0,38	0,40	0,43	0,431
Papua	0,389	0,412	0,40	0,38	0,41	0,42	0,44	0,442
INDONESIA	0,363	0,364	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41	0,413

Sumber :BPS Indonesia tahun 2013

Ketimpangan ini dibuktikan oleh data BPS tahun 2004, 2005 dan 2006. 40 persen populasi penduduk miskin ternyata hanya menikmati 20,80 persen (2004), 18,81 persen (2005) dan 19,75 persen (2006) dari pendapatan. Tidak sebanding dengan 20 persen penduduk kaya yang bisa menikmati pendapatan 42,07 persen (2004), 44,78 persen (2005), dan 42,15 persen (2006). Itu sebabnya Gini Ratio Indonesia masih berada di angka 0,32 (2004), 0,363 (2005), 0,33 (2006), 0,364 (2007), 0,35 (2008), 0,37 (2009), 0,38 (2010), 0,41(2011), 0,41(2012), 0,413(2013).

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus index Williamson, dapat diketahui tingkat ketimpangan di Sembilan provinsi di Indonesia selama tahun 2002-2014 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Bahwa antara Sembilan provinsi di Indonesia selama periode 2002-2014 tingkat pemerataan pendapatan berada ditingkat ketimpangan sangat tinggi yaitu nilai indeks lebih besar dari 0,39. Indeks Williamson pendapatan terendah terdapat pada tahun 2002 dan 2010 yaitu sebesar 0,91. Dan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2008 dengan nilai indeks Williamson pendapatan sebesar 0,99.

Adanya ketimpangan yang mencolok antar berbagai daerah (*inter-regional disparity*). Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antar daerah satu dengan lainnya. Ditinjau dari proporsinya, tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi tingkat kemiskinan di Jawa. Selain itu kesenjangan dapat dilihat pula dari perbedaan angka indeks pembangunan manusia yang mencolok antar daerah, termasuk antar perkotaan dan perdesaan.

Pada bulan Maret 2014 di Indonesia jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta orang, bila dibandingkan dengan September 2013 terjadi penurunan dari 28,60 juta orang dan persentasenya juga menurun dari 11,46% menjadi 11,25%(Kepala BPS,Suryamin,2014).

Masalah-masalah ekonomi seperti ini salah satunya disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Meskipun Indonesia merupakan negara yang cukup kaya, akan tetapi distribusi pendapatan tidak merata, maka kemiskinan tidak dapat dihindari. Dan jika ketimpangan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan semakin memperburuk keadaan perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan IV tahun 2007 meningkat 1,20 persen dibanding triwulan III tahun 2007 (*quartal to quartal*). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor bangunan sebesar 4,17 persen. Disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 2,12 persen, dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,08 persen. Besaran PDRB Sumatera Utara pada triwulan IV tahun 2007 atas dasar harga berlaku tercapai sebesar Rp. 50,02 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp. 25,21 triliun. Terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara triwulan IV tahun 2007 sebesar 1,20 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan sebesar 0,45 persen, disusul oleh sektor pertanian dan sektor bangunan yang memberi andil sama yaitu 0,21 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,14 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 0,11 persen. Sementara sektor-sektor perekonomian lainnya menyumbang dibawah 0,05 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan IV tahun 2007 dibandingkan dengan triwulan III tahun 2007 meningkat sebesar 2,86 persen. Pada triwulan yang sama pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat 1,23 persen, pembentukan modal tetap bruto 2,71 persen, ekspor barang dan jasa 2,13 persen dan impor barang dan jasa 8,42 persen. Disisi penggunaan, sebagian besar PDRB Sumatera Utara pada triwulan IV tahun 2007 digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yang mencapai 54,36 persen, disusul oleh ekspor neto 20,59 persen (ekspor 36,20

persen dan impor 15,61 persen), pembentukan modal tetap bruto 13,91 persen dan konsumsi Pemerintah 9,32 persen. (BPS;2008).

Pembangunan yang tidak merata dan terpusat pada beberapa sektor ekonomi di beberapa wilayah dengan sumber daya yang tinggi menyebabkan tingkat ketimpangan distribusi di Sumatera Utara masih tinggi walaupun Sumatera Utara mengalami Pertumbuhan Ekonomi.

Ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antaralain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2011).

Tabel 2
Indeks Gini Ratio Sumatera Utara Tahun 2005-2013

Provinsi	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sumatera Utara	0,327	0,307	0,31	0,32	0,35	0,35	0,33	0,354

Sumber :BPS Indonesia tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat angka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Sumatera Utara berdasarkan Indeks Gini Ratio setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 0,35 pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar 0,33.

Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2000-2010 yang dihitung menggunakan Williamson Index menunjukkan kecenderungan kenaikan. Pada tahun 2010, Williamson Index untuk Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 0,7148 atau jauh meningkat dibandingkan tahun 2000 yang hanya sebesar 0,5749. Kondisi disparitas pendapatan ini cukup mengkhawatirkan mengingat angka indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan disparitas yang semakin lebar.

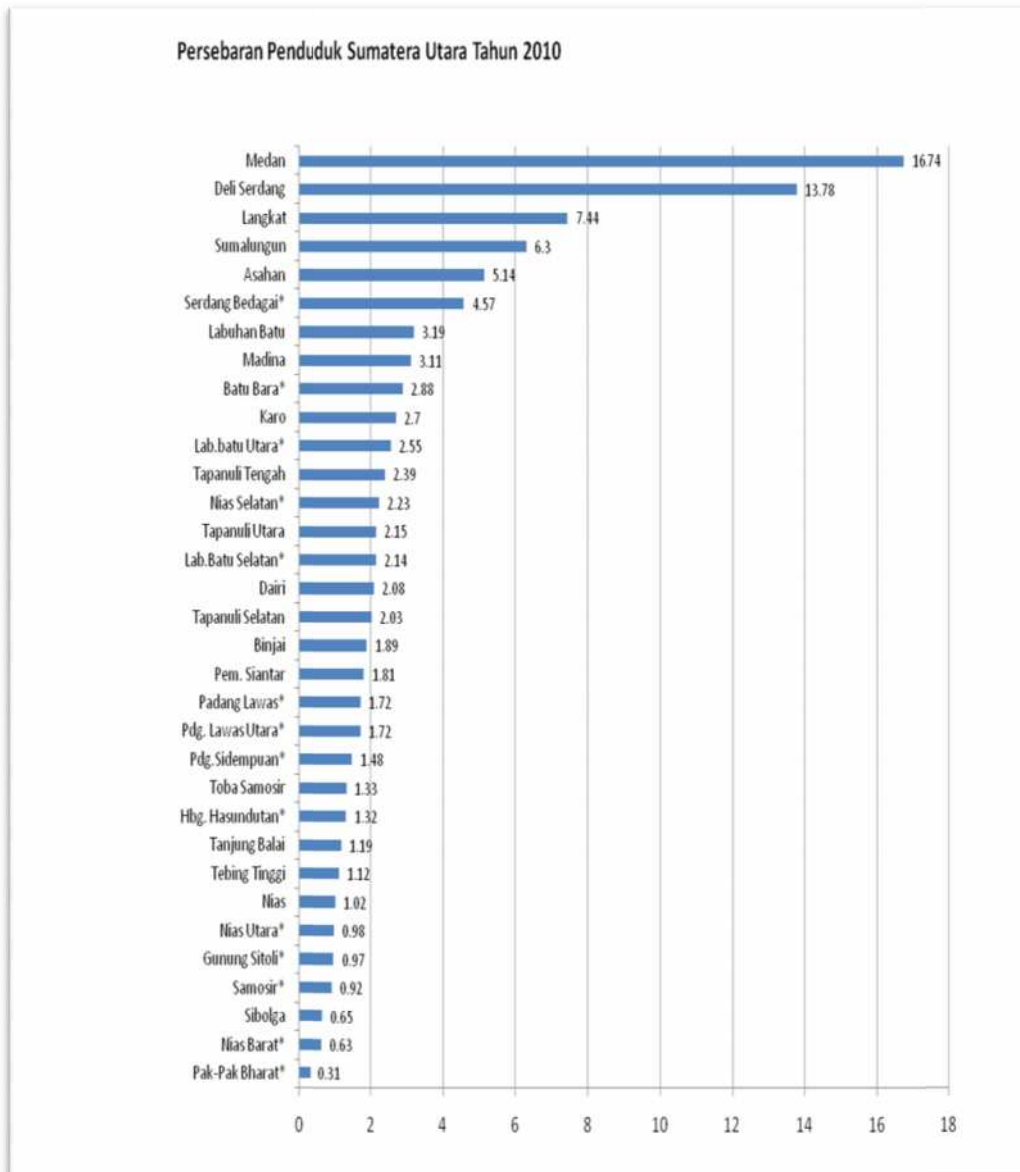
Daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan menghadapi beban yang terus meningkat karena banyak penduduk dari daerah lain terus berpindah ke daerah tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah perkotaan tersebut. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena sumber daya yang potensial terus berpindah ke daerah maju sebagai pusat pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan daerah pusat pertumbuhan mengalami akumulasi pertumbuhan yang lebih tinggi karena didukung oleh sumber daya potensial yang telah berpindah tersebut.

Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa persebaran penduduk banyak berada di kota Medan sebesar 36,74% dan selanjutnya Deli Serdang sebesar 35,78% sehingga di daerah tersebut pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi.

Menurut hasil survei BPS Agustus 2013 menyatakan bahwa persentase angkatan kerja berumur 15 tahun keatas tahun 2013 di dominasi pekerja dengan pendidikan tamatan SMA sebesar 34,16 dan diurutan kedua diikuti oleh pekerja dengan pendidikan tamatan SMP sebesar 24,49%. Dan dari data di atas dapat dilihat bahwa Sumatera Utara memiliki banyak pekerja

dengan pendidikan hanya tamatan SD, SMP dan SMA yang lebih mendominasi dengan skill (kemampuan) yang dimiliki masyarakat Sumatera Utara hanya sebatas kemampuan tamatan SMA.

Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi ini ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.



Gambar 1
Persebaran penduduk Sumatera Utara

B. KAJIAN TEORITIS

1. Definisi Ketimpangan

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (*disparity*). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

2. Jenis-jenis Ketimpangan

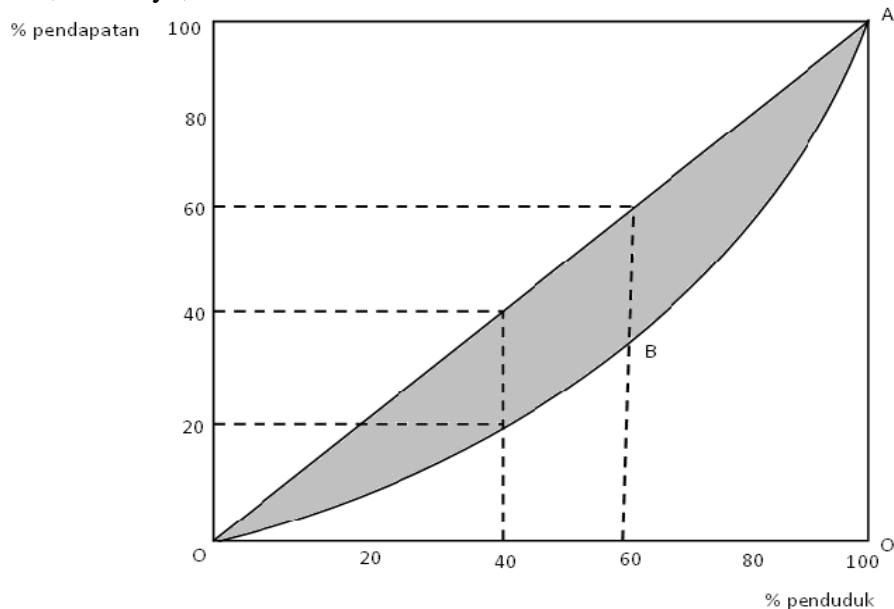
- ***Distribution Income Disparities (Ketimpangan Distribusi Pendapatan)***

Ketimpangan Distribusi Pendapatan adalah Distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total diantara berbagai rumah tangga dalam negara (Todaro,2011).

Terdapat berbagai macam alat yang dapat dijumpai dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk (*Distribution Income Disparities*), diantaranya yaitu :

- 1). Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode tertentu, misalnya, satu tahun.



Gambar 2
Kurva Lorenz

Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.

2) Rasio Gini /Gini Ratio

Gini index adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut Gini setiap kurva Lorenz dapat dihitung nilai angkanya yang selanjutnya disebut angka Gini dengan cara membagi luas yang dibentuk kurva Lorenz tersebut dengan total pendapatan. Maksimum dan minimum nilai G adalah : $0 \leq G \leq 1$.

Untuk menghitung *Gini Index* yaitu :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (P_i - P_{i-1})(Q_i + Q_{i-1})$$

dimana :

G = *Gini Index*

P_i = Persentase kumulatif jumlah penduduk sampai kelas ke- i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pendapatan sampai kelas ke- i

$i = 1, 2, 3, \dots, n$

$G = 0$, *Perfect Equality*

$G = 1$, *Perfect Inequality*

- *Regional Income Disparities*

Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah di dalam wilayah suatu negara. Jeffrey G. Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Williamson menggunakan *Williamson Index* (Indeks Williamson) untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas bahwa yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok. Formulasi Indeks Williamson secara statistik adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}, 0 < IW < 1$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

Y_i = Pendapatan per kapita daerah i

\bar{Y} = Pendapatan per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Angka koefisien Indeks Williamson adalah $0 < IW < 1$. Jika Indeks Williamson semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau

semakin merata dan sebaliknya angka yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Walaupun indeks ini memiliki kelemahan yaitu sensitive terhadap defenisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan artinya apabila ukuran wilayah yang digunakan berbeda maka akan berpengaruh terhadap hasil perhitungannya, namun cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan

Simon Kuznets (Todaro, 2011)) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (ketimpangan membesar), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik” (Hipotesis Kuznets).

Pembuktian hipotesis Kuznets dilakukan dengan membuat grafik antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan (Indeks Williamson). Jika kurva yang dibentuk oleh hubungan antara variabel tersebut menunjukkan kurva U-terbalik, maka hipotesis Kuznets terbukti bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi ketimpangan yang membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya.

Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Di samping itu, imbalan yang diperoleh dari investasi di sektor pendidikan mungkin akan meningkat terlebih dahulu, karena sektor modern yang muncul memerlukan tenaga kerja terampil, namun imbalan ini akan menurun karena penawaran tenaga terdidik meningkat dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik menurun. Jadi, walaupun Kuznets tidak menyebutkan mekanisme yang dapat menghasilkan kurva U-terbalik ini, secara prinsip hipotesis tersebut konsisten dengan proses bertahap dalam pembangunan ekonomi. Namun terlihat bahwa, dampak pengayaan sektor tradisional dan modern terhadap ketimpangan pendapatan akan cenderung bergerak berlawanan arah.

4. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan

Faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar propinsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar daerah karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula, apabila konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Kedua, meratanya

fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografi (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

b. Alokasi Investasi

Kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah.

c. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal antar propinsi juga merupakan faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional.

d. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses pembangunan di masing-masing daerah. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak memilikinya. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tetapi daerah tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.

e. Perbedaan Kondisi Demografi

Faktor utama lain yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan antar daerah adalah jika terdapat perbedaan kondisi demografi yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografi meliputi tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan dan tingkah laku masyarakat daerah tersebut.

Perbedaan kondisi demografi ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis variabel ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara. Jenis data dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data ketimpangan distribusi pendapatan yang dilihat dari koefisien gini dari tahun 2005 sampai tahun 2013. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

a. Letak Geografis Sumatera Utara

Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara berda di bagian barat Indonesia, terletak pada garis $1^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Utara dan $98^{\circ} - 100^{\circ}$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan provinsi Sumatra Utara adalah 71.680,68 Km² , sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau Nias, pulau – pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian Barat maupun di bagian Timur pantau pulau Sumatera.

Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.620,70 Km² , atau sekitar 9,23% dari total luas Sumatera utara, diikuti kabupaten Langkat dengan luas 6.263,29 Km² , kemudian kabupaten Simalungun dengan luas 4.386,60 Km² atau sekitar 6,12%. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kota Sibolga dengan luas 10,77 Km² atau sekitar 0,02% dari total luas wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunung Sitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pemantang Siantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

b. Kondisi Iklim

Karena terletak dekat garis khatulistiwa. Provinsi Sumatera Utara tergolong kedalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bias mencapai 33,40 C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan Universitas Sumatera Utara sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhunya minimalnya bisa mencapai 23,70 C. Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret. Diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

2. Gambaran umum Perkembangan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan, khususnya bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan gambaran tingkat perkembangan ekonomi.

Tabel 3
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (rupiah)

Kabupaten	2012	2013	2014
N i a s	13 292 683,44	14 046 053,44	14 721 177,28
Mandailing Natal	14 905 350,88	15 667 155,30	16 504 535,54
Tapanuli Selatan	22 872 795,73	26 646 496,05	27 609 224,74
Tapanuli Tengah	15 060 605,34	15 490 681,66	15 925 280,03
Tapanuli Utara	14 689 627,65	15 325 027,06	15 975 302,08
Toba Samosir	22 627 824,46	23 547 425,35	24 389 705,91
Labuhanbatu	37 390 288,20	38 824 307,49	40 049 808,47
Asahan	26 071 623,54	27 292 587,28	28 610 102,70
Simalungun	22 970 279,16	24 005 942,78	25 114 584,15
D a i r i	17 034 206,17	17 778 556,49	18 567 807,86
K a r o	27 883 731,14	28 686 548,87	29 602 056,17
Deli Serdang	25 081 088,95	26 746 146,72	28 152 036,58
Langkat	21 108 029,03	22 089 564,01	23 013 524,29
Nias Selatan	10 317 868,43	10 667 245,44	11 004 991,99
Humbang Hasundutan	16 678 315,99	17 427 293,75	18 141 947,58
Pakpak Bharat	13 354 137,37	13 845 068,48	14 358 561,12
Samosir	17 314 335,31	18 240 966,90	19 230 167,84
Serdang Bedagai	22 552 933,32	23 756 289,99	24 871 008,33
Batubara	46 269 548,75	47 653 057,62	49 076 570,28
Padang Lawas Utara	23 409 740,64	24 274 392,66	25 197 442,62
Padang Lawas	22 245 858,43	23 035 418,82	23 816 142,18
Labuhan batu Selatan	44 360 748,40	45 977 153,96	47 362 270,79
Labuhan batu Utara	35 228 102,86	37 031 332,05	38 623 362,75
Nias Utara	12 638 996,25	13 313 603,74	13 881 474,21
Nias Barat Kota	10 539 422,63	11 022 720,67	11 496 535,46
Sibolga	28 751 706,91	30 349 623,08	32 004 513,35
Tanjung balai	24 497 211,84	25 560 430,31	26 673 436,94
Pematang siantar	28 089 277,98	29 413 826,89	30 994 487,33
Tebing Tinggi	18 332 850,03	19 168 156,84	19 921 408,08
M e d a n	48 932 722,19	51 041 410,76	53 623 967,96

Binjai	21 819 826,88	22 817 958,89	23 827 106,93
Padang sidempuan	14 794 434,65	15 359 716,25	15 868 743,95
Gunung sitoli	17 445 888,76	18 262 046,50	19 117 332,99
Sumatera Utara	28 036 879,18	29 343 040,07	30 482 590,52

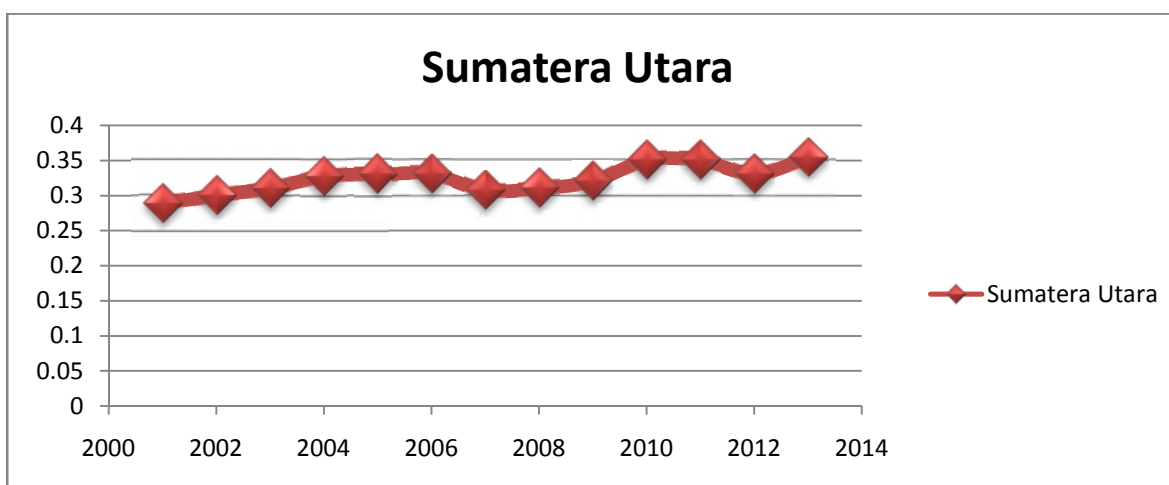
Sumber : BPS Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi setiap tahun mengalami peningkatan dapat dilihat dari nilai PDRB per/kapita Sumatera Utara atau Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, nilai PDRB untuk provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2012 sebesar 28.036.879,18 tahun 2013 naik menjadi 29.343.040,07 dan tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi 30.482.590,52.

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara nilai PDRB tertinggi di Kota Medan dengan nilai 53.623.967,96 tahun 2014 dan diikuti dengan Kabupaten Batubara dengan nilai 49.076.570,28 tahun 2014 lalu Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan nilai 47.362.270,79 tahun 2014.

3. Gambaran Umum Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Ketimpangan ekonomi yang tinggi di suatu provinsi itu disebabkan oleh salah satunya pembangunan ekonomi yang tidak merata di setiap kabupaten/kota tersebut. Ketimpangan distribusi ini diwakili dengan *Gini Ratio* (Koefisien gini) yang persebarannya dapat dilihat pada gambar dibawah.



Sumber : BPS Sumatera Utara

Gambar 3
Perkembangan Ratio Gini Sumatera Utara

Ketimpangan distribusi pendapatan untuk Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013 koefisien gini sebesar 0,354 sementara tahun sebelumnya yakni tahun 2012 koefisien gini mengalami penurunan 0,336. Dan kembali mengalami peningkatan tahun 2010 dan 2011 masing-masing 0.25. Koefisien gini Sumatera Utara moderat di angka 0,3.

Tabel 4
Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
Nias	0,280	0,223	0,325	0,261	0,272073
Mandailing natal	0,225	0,244	0,324	0,190	0,245907
Tapanuli Selatan	0,184	0,225	0,290	0,169	0,217259
Tapanuli Tengah	0,257	0,327	0,395	0,259	0,309331
Tapanuli Utara	0,255	0,293	0,374	0,251	0,293467
Toba Samosir	0,256	0,222	0,286	0,180	0,236017
Labuhan Batu	0,203	0,234	0,271	0,232	0,234894
Asahan	0,214	0,255	0,334	0,202	0,251054
Simalungun	0,249	0,240	0,298	0,230	0,254145
Dairi	0,222	0,227	0,336	0,187	0,242972
Karo	0,209	0,186	0,189	0,098	0,170531
Deli Serdang	0,192	0,219	0,290	0,194	0,223683
Langkat	0,213	0,256	0,293	0,219	0,245240
Nias Selatan	0,248	0,226	0,365	0,188	0,256785
Humbang Hasundutan	0,264	0,244	0,355	0,206	0,266947
Pakpak Bharat	0,252	0,246	0,375	0,236	0,277290
Samosir	0,273	0,252	0,447	0,288	0,31493
Serdang Bedagai	0,209	0,204	0,231	0,161	0,201439
Batubara	0,195	0,247	0,296	0,208	0,236614
Padang Lawas Utara	0,212	0,208	0,356	0,155	0,232818
Padang Lawas	0,231	0,240	0,314	0,199	0,245717
Labuhan Batu Selatan	0,217	0,170	0,214	0,108	0,177388
Labuhan Batu Utara	0,206	0,188	0,247	0,164	0,201195
Nias Utara	0,252	0,239	0,380	0,247	0,279398
Nias Barat	0,266	0,334	0,357	0,197	0,288288
Sibolga	0,220	0,249	0,243	0,165	0,219155
Tanjung Balai	0,241	0,283	0,372	0,287	0,295698
Pematang Siantar	0,182	0,236	0,277	0,159	0,213465
Tebing Tinggi	0,232	0,253	0,289	0,193	0,241684
Medan	0,173	0,202	0,261	0,172	0,202029
Binjai	0,219	0,250	0,256	0,197	0,230403
Padang Sidempuan	0,233	0,230	0,269	0,184	0,228976
Gunung Sitoli	0,375	0,317	0,413	0,276	0,345460
Sumatera Utara	0,35	0,35	0,33	0,354	0,350083

Sumber: BPS Sumatera Utara

Berdasarkan data, bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara semakin meningkat walaupun tidak sebesar ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia jika dilihat

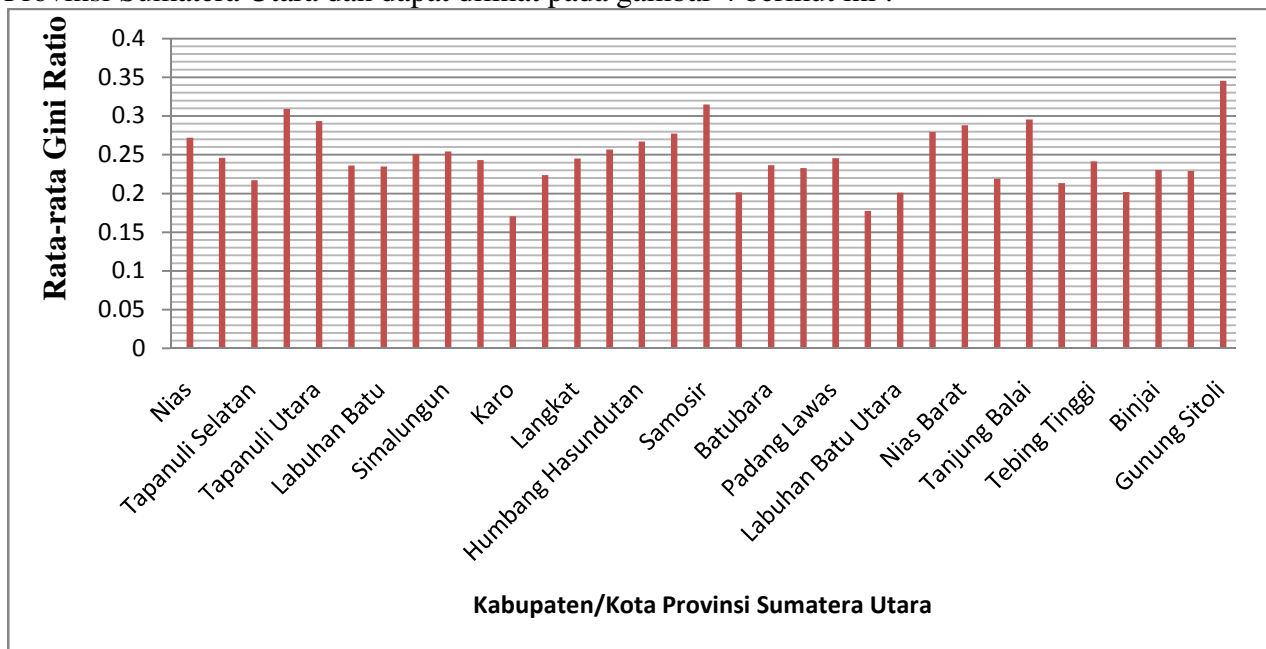
dari nilai koefisien ginya, dimana koefisien gini di Sumatera Utara pada tahun 2013 mencapai 0,354 dimana koefisiennya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, artinya tahun 2013 distribusi pendapatan di Sumatera Utara mengalami ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun angka koefisien ginya masih mendekati angka 0 dimana koefisien gini yang mendekati angka 0 berarti semakin baik atau merata distribusi pendapatan dan koefisien gini yang mendekati angka 1 berarti semakin timpang distribusinya.

Tahun 2013 ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi terjadi di Samosir 0,28 dan Tanjung Balai sebesar 0,287 sementara ketimpangan distribusi pendapatan yang paling rendah bahkan mendekati nol (pemerataan sempurna) terjadi di kabupaten Karo sebesar 0,098 dan Labuhan Batu Selatan sebesar 0,108.

Tahun 2012 ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi terjadi di Samosir diangka 0,447 dan Gunung Sitoli diangka 0,413 dan sementara ketimpangan distribusi pendapatan yang paling rendah terjadi di kabupaten Labuhan batu Selatan di angka 0,214.

Tahun 2011 ketimpangan distribusi tertinggi terjadi di Tapanuli Tengah dimana koefisien gini sebesar 0,327 dan Gunung Sitoli sebesar 0,317 dan sementara ketimpangan distribusi pendapatan yang paling rendah terjadi di kabupaten Labuhan batu Selatan diangka 0,170.

Rata-rata ketimpangan ekonomi yang dilihat dari data indeks *Gini Ratio* kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dan dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini :



Sumber : BPS Sumatera Utara

Gambar 4
Rata-rata Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perkembangan ekonomi yang dilihat dari PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara selama tahun pengamatan menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat dilihat dari data tahun terakhir yang merupakan angka tertinggi sebesar 30 482 590,52, adapun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera nilai PDRB per kapita selama tahun pengamatan juga mengalami peningkatan nilai PDRB yang tertinggi terdapat di Kota Medan dengan angka 53 623967,96.
2. Ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang dilihat dari *Gini Ratio* selama tahun pengamatan berada di angka 0,35 yang artinya pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara relatif merata, dan nilai *Gini Ratio* tertinggi menurut kabupaten/kota selama tahun pengamatan terjadi di Samosir dengan angka 0,447.

Saran

Sebaiknya pemerintah tidak hanya menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memperhatikan masalah ketimpangan distribusi pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Fadilla (2011), *Teori Kriminalitas*. Diakses 28 Desember 2015 <http://fadillaazhar.blogspot.com/2011/03/kriminalitas>.
- Anata, Firdaus (2013), *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk dan Index Williamson Terhadap Tingkat Kriminalitas*, Malang.
- Christian, Lumenta, Jhon S, Kekenusa dan Djoni Hatidja (2009), *Analisis Jalur Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas*. Manado.
- Djalal, Nachrowi dan Hardius Usman (2008), *Penggunaan Teknik Ekonometrik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Donny, Suryana (2013), *Analisis Perencanaan Pembangunan dalam Upaya pengurangan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Jember Tahun 2006-2011*. Jember.
- Dumairy, 2006, "Perekonomian Indonesia", Erlangga, Jakarta.
- Gujarati, Damodar, (2003). *Basic Ekonometrik (Ekonometrika Dasar) edisi keempat*. Mc Graw-Hill / Irvin.
- Hamzah, Andi (1986), *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Ashani Nurul (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Sumatera Utara (Melalui Pendekatan Ekonomi)*. Medan.
- Hendry, Davy (2014), *Kriminalitas: Sebuah Sisi Gelap Dari Ketimpangan Distribusi Pendapatan*. Padang.
- Kartono, Kartini (1994), *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Maju Mundur, Bandung.
- Kuncoro, Mudrajat (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani (2001). *Kriminologi Edisi I*. Rajawali Persada, Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto (1996). *KUHP dan KUHP Kriminalitas*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiarti, Yayuk. *Kemiskinan Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kriminalitas*. Sumenep
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 11. Erlangga, Jakarta.
- Yudho, Dito Arsono (2014). *Pengaruh Variabel Pendidikan, Pengangguran, Rasio Gini, Usia, dan Jumlah Polisi Perkapita Terhadap Angka Kejahatan Property*. Semarang.